



## SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER



**RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun sebagai acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2024. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026.

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tana Paser, 4 Agustus 2023



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD .....	21
2.4 Review terhadap RKPD .....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD .....	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD .....	35
3.3 Program dan Kegiatan .....	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD .....	59
BAB V PENUTUP .....	65

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2022 .....	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2022 .....	20
Tabel 2.3	Pencapaian Pelayanan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser .....	23
Tabel 2.4	Review tehadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Paser .....	29
Tabel 3.1	Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan .....	35
Tabel 3.2	Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 .....	36
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Kondisi Akhir .....	48
Tabel 3.4	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2024 .....	59

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 (RKPD).
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

22. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *Good and Clean Governance*. Di samping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.
5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun lalu dan perkiraan capaian tahun

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja yang diharapkan tahun ini

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.**

Berisikan uraian sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

## **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

### **SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD**

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Paser 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
4. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2021-2026 adalah "Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas dan Kinerja DPRD".

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel
2. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (6+7+9)	11 = (10/4)	
4.02.00.00.00.00.0000	Sekretariat DPRD										
4.02.00.00.00.00.0000	Sekretariat DPRD										
4.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	80	-	70	-	70	-	100	72	212
4.02.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	A	-	B	-	B	-	100	B	B
4.02.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	3	dok	2	dok	100	2	6
4.02.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	dok	1	dok	1	dok	100	1	3

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
4.02.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%			80	%	80	%	100	82	222
4.02.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	275
4.02.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	275
4.02.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5000 (2500 SPP, 2500 SPM)	dok			1000 (2500 SPP, 2500 SPM)	dok	1356	dok	135,6	1000 (2500 SPP, 2500 SPM)	2760
4.02.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	%			100	%	100	%	100	100	300
4.02.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	275
4.02.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	%	-	%	-	%	-	%	-	-	-
4.02.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Diklat	95	%	75	%	80	%	80 (25 orang)	%	100	85%	198

4.02.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	275	
4.02.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	%	7	jenis	100	%	100	%	100	100	275	
4.02.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	%	11	unit	100	%	100	%	100	100	275	
4.02.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	%	60	buah	100	%	100	%	100	100	275	
4.02.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	%	7	jenis	100	%	100	%	100	100	275	
4.02.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	38180	Eksemplar	4	jenis	7636	Eksemplar	7636	Eksemplar	100	7636	19777	52
4.02.001.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10000	orang	3	jenis	2000	orang	2000	orang	100	2000	5510	55
4.02.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22500	kotak	1	kali	4500	kotak		kotak		4500	9000	40
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30	kali			96	kali	96	kali	100	96	271	
4.02.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	40 (arsip)	dokumen	12	dokumen	8 (arsip)	dokumen	8	dokumen	100	8 (arsip AKD :)	21	52,5

		Dinamis pada SKPD	AKD : 35 dok, arsip sekretari at : 5 dok)				AKD : 7 dok, arsip sekretar iat : 1 dok)					7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	
4.02.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	275
4.02.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	-	-
4.02.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	170	jenis	15	jenis	34	jenis	34	jenis	100	34	94
4.02.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	275
4.02.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	95	rekening	19	rekening	19	rekening	19	rekening	100	19	57
4.02.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	33
4.02.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	275

		<b>yang terpelihara</b>												
4.02.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	unit	3	unit	4	unit	4	unit	100	4	11	55
4.02.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	unit	8	unit	3	unit	3	unit	100	3	9	60
4.02.001.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	250	bah	60	bah	50	bah	50	bah	100 -	50	150	75
4.02.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	415 (400 AC dan 15 genset)	unit	60	unit	83 (80 AC dan 3 genset)	unit	83	unit	100	83 (80 AC dan 3 genset)	225	54
4.02.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 (20 unit rumjab dan 5 kantor)	unit	5	unit	5 (4 unit rumjab dan 1 kantor)	unit	5	unit	100	5 (4 unit rumjab dan 1 kantor)	14	56
4.02.001.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	135 (60 komputer, 50 printer, 25 jaringan listrik)	unit	60	unit	27 (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	unit	27	unit	100	27 (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	72	53
4.02.001.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<b>Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>275</b>	
4.02.001.2.15.001	Penyelenggaraan	Kesesuaian data	100	%	100	%	100	%	75	%	75	100	275	

	Administrasi Keuangan DPRD	keanggotaan dewan dengan daftar gaji anggota DPRD												
4.02.001.2.15.002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	750	stel	150	stel	150	stel	150	stel	100	150	300	40
4.02.001.2.15.003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	150	orang	30	orang	30	orang	28	orang	93,33	30	87	58
<b>4.02.001.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>275</b>	
4.02.001.2.16.002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	30	fraksi	6	fraksi	6	fraksi	6	fraksi	100	6	16	53
4.02.001.2.16.003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100	kali	41	kali	20	kali	20	kali	100	20	55	55
4.02.001.2.16.004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	180	jenis	3	paket	36	jenis	36	jenis	100	36	98	54
<b>4.02.002</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	
		<b>Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>30</b>	<b>Dok</b>	<b>6</b>	<b>Dok</b>	<b>6</b>	<b>Dok</b>	<b>6</b>	<b>Dok</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>60</b>
		<b>Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>252</b>	
4.02.002.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	50	Dok Perda	10	Dok Perda	7	Dok Perda	7	Dok Perda	100	10	22	44

4.02.002.2.01.001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	2	40
4.02.002.2.01.002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	50	Raperda	9	Raperda	7	Raperda	7	Raperda	100	10	22	44
4.02.002.2.01.003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	25	Dok	4	Dok	5	Dok	3	Dok	60	5	10	40
4.02.002.2.01.004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	15	Dok naskah akademik	-	Dok naskah akademik	3	Dok naskah akademik	3	Dok naskah akademik	100	3	6	40
4.02.002.2.01.005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	5	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	3	60
<b>4.02.002.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran</b>	<b>25</b>	<b>Rekomen dasi</b>	<b>5</b>	<b>Rekomen dasi</b>	<b>5</b>	<b>Rekomen dasi</b>	<b>5</b>	<b>Rekomen dasi</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
4.02.002.2.02.001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	100	1	3	60
4.02.002.2.02.002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	100	1	3	60
4.02.002.2.02.003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	100	1	3	60
4.02.002.2.02.004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	100	1	3	60
4.02.002.2.02.006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban	5	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	1	Dok rekomen dasi	100	1	3	60

		APBD												
4.02.002.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	310	Rekomen dasi	20	Rekomen dasi	20	Rekomen dasi	20	Rekome ndasi	100	20	154	50
4.02.002.2.03.001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50	dok rekome ndasi	3	dok rekomend asi	3	dok rekomend asi	3	dok rekome ndasi	100	10	26	52
4.02.002.2.03.002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50	dok rekome ndasi	3	dok rekomend asi	3	dok rekomend asi	3	dok rekome ndasi	100	10	26	52
4.02.002.2.03.003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50	dok rekome ndasi	3	dok rekomend asi	3	dok rekomend asi	3	dok rekome ndasi	100	10	26	52
4.02.002.2.03.004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50	dok rekome ndasi	3	dok rekomend asi	3	dok rekomend asi	3	dok rekome ndasi	100	10	26	52
4.02.002.2.03.005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50	dok rekome ndasi	3	dok rekomend asi	3	dok rekomend asi	3	dok rekome ndasi	100	10	26	52
4.02.002.2.03.006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5	dok rekome ndasi	1	dok rekomend asi	1	dok rekomend asi	1	dok rekome ndasi	100	1	3	60
4.02.002.2.03.007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	50	dok rekome ndasi	3	dok rekomend asi	3	dok rekomend asi	3	dok rekome ndasi	100	10	26	52
4.02.002.2.03.008	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan	5	dok rekome	1	dok rekomend	1	dok rekomend	1	dok rekome	100	1	3	60

	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		ndasi		asi		asi		ndasi				
<b>4.02.002.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>99,42</b>	<b>100</b>	<b>275</b>	
4.02.002.2.04.001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	150	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	-	-	
4.02.002.2.04.002	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	150	Orang	30	Orang	65	Kali	63	Kali	96,52	30	121	81
4.02.002.2.04.003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	120	Dok	12	Keg	24	Dok	24	Dok	100	24	66	55
4.02.002.2.04.004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60	Dok	70	%	12	Dok	12	Dok	100	12	33	55
4.02.002.2.04.005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	360	Dok	6	orang	72	Dok	72	Dok	100	72	198	55
4.02.002.2.04.006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60	Dok	4	kegiatan	12	Dok	12	Dok	100	12	33	55
4.02.002.2.04.007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	Dok	1	Dok	1	Dok	-	Dok	-	1	2	40
<b>4.02.002.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan</b>	<b>475</b>	<b>Dok</b>	<b>95</b>	<b>Dok</b>	<b>92</b>	<b>Dok</b>	<b>92</b>	<b>Dok</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>251</b>	<b>53</b>

		<b>pembangunan daerah</b>												
4.02.002.2.05.001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	20	dok laporan	1	rekomen dasi	4	dok laporan	-	dok laporan	-	4	8	40
4.02.002.2.05.002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	5	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	3	60
4.02.002.2.05.003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	450	Dok	3	Dok	90	Dok	90	Dok	100	90	240	53
<b>4.02.002.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD</b>	<b>10</b>	<b>Dok</b>			<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>30</b>
4.02.002.2.06.001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	Dok			1	Dok	-	Dok	-	1	2	-
4.02.002.2.06.002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	Dok			1	Dok	1	Dok	1	1	3	60
<b>4.02.002.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Dok laporan fasilitasi tugas DPRD</b>	<b>175</b>	<b>Dok</b>	<b>35</b>	<b>Dok</b>	<b>35</b>	<b>Dok</b>	<b>35</b>	<b>Dok</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>94</b>	<b>54</b>
4.02.002.2.08.001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	50	Dok laporan	1	Dok laporan	10	Dok laporan	10	Dok laporan	100	10	26	52
4.02.002.2.08.002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	2	40
4.02.002.2.08.003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100	12	33	55
4.02.002.2.08.004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100	12	33	55

## **2.2      Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD adalah:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Upaya Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel
2. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel. 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Paser**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Sekretariat DPRD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2026 (n+2)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP			B	B (70)	BB (72)	A	A	B	B (63,92)	BB (72)	A	Realisasi 2023 sudah dicapai pada triwulan II. Proyeksi 2024 dan 2025 memakai angka target
2	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			75%	80%	82%	85%	90%	75%	35%	82%	85%	Realisasi 2023 adalah realisasi sampai dengan triwulan II. Proyeksi 2024 dan 2025 memakai angka target

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian target Sasaran Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP" sudah mencapai target, dimana realisasinya adalah nilai B (63,92) sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu nilai B (70), sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 91,31%
- b. Sasaran "Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" belum mencapai target karena realisasi baru sampai dengan triwulan II, di mana realisasinya sebesar 35% dari target sebesar 80%

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Berdasarkan kepada tugas pokok, fungsi, dan organisasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Paser adalah:

- a. Menyelenggarakan pelayanan umum yang handal, efektif, efisien dan akuntabel guna menunjang pelaksanaantugas-tugas DPRD .
- b. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor dan gedung DPRD.
- c. Menyelenggarakan/memberikan pelayanan penyediaan tenaga asistensi, aplikasi dan tenaga ahli.
- d. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan anggaran dan keuangan.
- e. Menjaga, mengamankan dan mensosialisasikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD.

Tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat melayani segala kegiatan Anggota maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu sifatnya pemberian informasi berkenaan dengan aturan, pelayanan kegiatan rapat-rapat, pelayanan pendampingan kegiatan kunjungan kerja maupun peningkatan sumber daya manusia, serta pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu bertujuan menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Fungsi pertama sebagaimana point kesatu diwujudkan dalam membentuk dan penetapan Peraturan daerah bersama sama dengan kepala daerah beserta jajarannya, fungsi kedua yaitu fungsi anggaran merupakan keterpaduan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan suatu kesepahaman bersama di dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan fungsi ketiga diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan produk peraturan perundang undangan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala

daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang kesemuanya dijalankan semata-mata sebagai fungsi kontrol pihak legislatif terhadap eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, di dalam menjalankan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah, yang selanjutnya diimplementasikan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah baik dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, dengan kata lain DPRD merupakan partner pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan di segala bidang.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang. Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser yaitu sebagai berikut:

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
- d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundungan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD

#### **2.4 Review Terhadap RKPD**

Review terhadap RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan program dan kegiatan yang baru atau adanya rancangan perubahan. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2024 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Paser**

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat</b>	<b>74</b>	<b>35.355.592.420</b>	<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat</b>	<b>74</b>	<b>37.863.416.412</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten</b>	<b>BB</b>	<b>116.979.380</b>	<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten</b>	<b>BB</b>	<b>116.979.380</b>
1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	67.860.110	1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	67.860.110
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2.799.680	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2.799.680
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	46.319.590	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	46.319.590
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.371.007.641</b>	<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.921.007.641</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	6.316.204.461	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	6.866.204.461
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	24.844.420	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	24.844.420
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	29.958.760	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	29.958.760
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>104.844.000</b>	<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>280.444.000</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105 Paket	-	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105 Paket	-

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	104.844.000	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	280.444.000
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>871.415.087</b>	<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.471.910.735</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	31.000.640	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	31.000.640
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	338.019.510	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	1.738.019.510
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	105.720.285	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	105.720.285
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	36.003.000	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	36.003.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	56.300.000	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	171.000.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	32.485.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	109.195.300
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	236.804.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	241.307.000
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	35.082.652	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	39.665.000
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.733.560.411</b>	<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>2.186.655.211</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1.500.000.000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	1.953.094.800
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	233.560.411	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	233.560.411
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1.508.361.832</b>	<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>2.310.644.472</b>

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	588.113.200	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	961.753.200
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	920.248.632	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1.348.909.272
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>1.314.536.802</b>	<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>1.562.046.903</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	358.399.204	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	358.399.204
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	154.489.899	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	272.000.000
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000	3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	167.103.840	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	167.103.840
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	527.671.859	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	657.671.859
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	92.232.000	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	92.232.000
<b>VIII</b>	<b> Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>22.290.694.513</b>	<b>VIII</b>	<b> Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>26.365.097.870</b>
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/bulan	21.583.674.513	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/bulan	24.932.434.270
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	326.070.000	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	1.051.713.600
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	380.950.000	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	380.950.000

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)
<b>IX</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Percentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.044.192.754</b>	<b>IX</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Percentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.682.842.174</b>
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2 laporan	53.352.074	1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2 laporan	53.352.074
2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	417.667.000	2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	676.333.400
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	40 paket	573.173.680	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	40 paket	953.156.700
<b>B</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Percentase perda yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>15.850.389.504</b>	<b>B</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Percentase perda yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>25.754.120.900</b>
		<b>Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>6 Dok</b>				<b>Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>6 Dok</b>	
		<b>Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>				<b>Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	
<b>I</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan</b>	<b>10 dok Perda</b>	<b>2.577.162.451</b>	<b>I</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan</b>	<b>10 dok Perda</b>	<b>4.502.728.700</b>
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.300	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.300
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	1.762.658.451	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	3.472.484.300
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	335.399.650	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	410.399.600
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	460.585.600	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	460.585.600
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	9.259.450	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	150.000.000
<b>II</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan</b>	<b>5 rekomenda</b>	<b>573.757.000</b>	<b>II</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan</b>	<b>5 rekomenda</b>	<b>1.522.230.600</b>

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)
		<b>anggaran</b>	<b>si</b>				<b>anggaran</b>	<b>si</b>	
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	84.595.000	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	84.595.000
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.140.500	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.140.500
3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	147.235.000	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	922.785.600
4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	30.450.500	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	30.450.500
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	280.336.000	5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	453.259.000
<b>III</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti</b>	<b>62 rekomen da si</b>	<b>5.646.235.000</b>	<b>III</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti</b>	<b>62 rekomen da si</b>	<b>9.401.392.000</b>
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	867.220.000	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	1.476.527.000
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	867.220.000	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	1.476.820.000
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	867.220.000	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	1.471.968.000
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	867.220.000	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	1.476.579.000
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	867.220.000	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	1.476.415.000
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	30.861.000	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	97.803.000
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	867.220.000	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	1.472.020.000
8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	1 dokumen	412.054.000	8	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	1 dokumen	453.260.000

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)
	Daerah	Pertanggungjawaban Kepala Daerah				Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal</b>	<b>100%</b>	<b>3.195.339.600</b>	<b>IV</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal</b>	<b>100%</b>	<b>5.015.390.000</b>
1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	-	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	250.000.000
2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalam Tugas DPRD	3 dokumen	1.305.822.000	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalam Tugas DPRD	3 dokumen	1.804.620.000
3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	298.995.000	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	327.784.000
4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	264.172.000	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	268.936.000
5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.732.000	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.720.000
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	1.042.498.600	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	2.080.210.000
7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000
<b>V</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>95 Dok</b>	<b>1.762.251.800</b>	<b>V</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>95 Dok</b>	<b>2.525.124.600</b>
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.370.000	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.370.000
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	84.987.000	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	84.987.000
3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	1.607.894.800	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	2.370.767.600
<b>VI</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD</b>	<b>2 Dok</b>	<b>139.932.453</b>	<b>VI</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD</b>	<b>2 Dok</b>	<b>294.519.000</b>
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	-	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	150.000.000
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	139.932.453	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	144.519.000

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)
<b>VII</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Dok laporan fasilitasi tugas DPRD</b>	<b>35 Dok</b>	<b>1.955.711.200</b>	<b>VII</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Dok laporan fasilitasi tugas DPRD</b>	<b>35 Dok</b>	<b>2.492.736.000</b>
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 dokumen	472.732.000	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 dokumen	972.213.000
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.000.000	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.000.000
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	753.455.000	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	762.843.000
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	704.524.200	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	732.680.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>51.205.981.924</b>					<b>69.651.749.286</b>

Pada tabel di atas terdapat perbedaan pagu antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, mengingat pagu yang ada pada hasil analisis kebutuhan merupakan pagu yang dihitung berdasarkan matriks rencana kegiatan DPRD tahun 2024 dalam rangka memfasilitasi tiga fungsi DPRD serta memfasilitasi hak administrasi dan hak keuangan DPRD selama tahun 2024.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asiasi, perguruan tinggi yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

Dalam hal ini Sekretariat DPRD tidak termasuk ke dalam kelompok SKPD yang menjalankan prioritas pembangunan secara spesifik, di mana tugas dan fungsi yang dijalankan hanya merupakan unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi DPRD, sehingga tidak ada program dan kegiatan yang dijalankan berdasarkan usulan masyarakat melalui forum Musrenbang.

**Tabel 2.4**  
**Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024**  
**pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser**

No	Pokok-Pokok Pikiran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni:

- (1) merosotnya kewibawaan negara;
- (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional;
- (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan:

- (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;
- (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;
- (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2029-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Pernyataan Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

**“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”**

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER MAJU adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER ADIL adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik social.

3. Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

Dengan memperhatikan penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser di atas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser memiliki keterkaitan tugas dan fungsi pada misi kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tupoksi Sekretariat DPRD yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan RPJMD di atas, maka indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan aktualisasi penyelenggaraan/pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Dari uraian di atas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- A. Tugas utama: Meningkatnya Fasilitasi terhadap DPRD dalam melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Pengawasan dan Anggaran, melalui PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD, dengan kegiatan:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  4. Peningkatan Kapasitas DPRD
  5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  7. Fasilitasi Tugas DPRD
- B. Tugas pendukung: Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD, melalui PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  9. Layanan Administrasi DPRD

Dalam menunjang meningkatnya kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang trampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan maka yang menjadi tujuan strateginya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas DPRD

Penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser harus menetapkan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, baik satu tahun, dua tahun, hingga lima tahun ke depan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kab. Paser tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel.
2. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

**Tabel 3.2**  
**Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**Rencana Kerja Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel</b>	<b>Nilai evaluasi SAKIP dari APIP</b>	<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat</b>	<b>74</b>	<b>35.355.592.420</b>
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten</b>	<b>BB</b>	<b>116.979.380</b>
				Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	67.860.110
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2.799.680
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	46.319.590
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya</b>	<b>100%</b>	<b>6.371.007.641</b>

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	6.316.204.461
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	24.844.420
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	29.958.760
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>104.844.000</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	104.844.000
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>871.415.087</b>

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	31.000.640
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	338.019.510
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	105.720.285
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	36.003.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	56.300.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	32.485.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	236.804.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	35.082.652
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.733.560.411</b>

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1.500.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	233.560.411
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1.508.361.832</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	588.113.200
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	920.248.632
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>1.314.536.802</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	358.399.204

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	154.489.899
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	167.103.840
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	527.671.859
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	92.232.000
				<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>22.290.694.513</b>
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/bulan	21.583.674.513
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	326.070.000
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	380.950.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.044.192.754</b>
				Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2 laporan	53.352.074
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	417.667.000
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	40 paket	573.173.680
	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>15.850.389.504</b>
					<b>Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>6 Dok</b>	
					<b>Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	
				<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan</b>	<b>10 dok Perda</b>	<b>2.577.162.451</b>
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.300

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	1.762.658.451
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	335.399.650
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	460.585.600
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	9.259.450
				<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran</b>	<b>5 rekomendasi</b>	<b>573.757.000</b>
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	84.595.000
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.140.500
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	147.235.000
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	30.450.500
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	280.336.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti</b>	<b>20 laporan</b>	<b>5.646.235.000</b>
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	30.861.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	867.220.000
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	412.054.000
				<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal</b>	<b>100%</b>	<b>3.195.339.600</b>
				Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	-
				Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	1.305.822.000
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	298.995.000
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	264.172.000
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.732.000
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	1.042.498.600
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>92 Dok</b>	<b>1.762.251.800</b>
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.370.000
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	84.987.000
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	1.607.894.800
				<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD</b>	<b>2 Dok</b>	<b>139.932.453</b>
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	-
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	139.932.453
				<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Dok laporan fasilitasi tugas DPRD</b>	<b>35 Dok</b>	<b>1.955.711.200</b>
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 dokumen	472.732.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.000.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	753.455.000
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	704.524.200
							<b>51.205.981.924</b>

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **a. Faktor-faktor Rumusan Program dan Kegiatan**

Program adalah alat kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkret untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### **b. Rekapitulasi program dan kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2024 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Paser yang ingin diwujudkan pada 2021-2026 yaitu **Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera**. Adapun pada tahun 2024 Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ada 2 program, 16 kegiatan, dan 62 sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Kondisi Akhir**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
4.02	Sekretariat DPRD								
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat		74	35.355.592.420			80	189.863.894.051
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Sekretariat DPRD	BB	116.979.380	APBD		25 Dok	615.967.369
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	2 Dok	67.860.110	APBD		10 Dok	340.108.792
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	2 Dok	2.799.680	APBD		10 Dok	16.153.908
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dok	46.319.590	APBD		5 Dok	259.704.669
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	100%	6.371.007.641	APBD		100%	33.638.815.678

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	45 orang/bulan	6.316.204.461	APBD		225 orang/60 bulan	33.334.905.959
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat DPRD	12 Dok	24.844.420	APBD		60 Dok	138.140.781
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat DPRD	2 Dok	29.958.760	APBD		10 Dok	165.768.938
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>104.844.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.355.868.345</b>
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat DPRD	105 Paket	-	APBD		525 Paket	-
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar kabupaten dan luar provinsi	20 orang	104.844.000	APBD		100 orang	1.355.868.345
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>871.415.087</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>5.943.519.982</b>
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 paket	31.000.640	APBD		5 paket	171.343.251
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	10 paket	338.019.510	APBD		50 paket	2.034.401.823

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	7 paket	105.720.285	APBD		35 paket	584.372.693
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 paket	36.003.000	APBD		5 paket	198.967.483
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	4 dokumen	56.300.000	APBD		20 dokumen	317.192.232
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	1 laporan	32.485.000	APBD		5 laporan	179.590.752
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	45 laporan	236.804.000	APBD		225 laporan	1.869.481.296
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat DPRD	8 dokumen	35.082.652	APBD		40 Dok	588.170.460
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.733.560.411</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2.773.780.908</b>
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	0	1.500.000.000	APBD		3 unit	-
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretariat DPRD	34 unit	233.560.411	APBD		170 unit	2.773.780.908

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor</b>	Sekretariat DPRD	<b>100%</b>	<b>1.508.361.832</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>8.349.175.066</b>
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 laporan	588.113.200	APBD		60 laporan	3.261.024.220
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	2 laporan	920.248.632	APBD		10 laporan	5.088.150.845
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.314.536.802</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6.819.456.096</b>
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretariat DPRD	4 unit	358.399.204	APBD		20 unit	2.081.214.369
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekretariat DPRD	3 unit	154.489.899	APBD		15 unit	1.036.828.454
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sekretariat DPRD	50 unit	14.640.000	APBD		250 unit	82.884.469
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekretariat DPRD	105 unit	167.103.840	APBD		525 unit	925.453.276

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	7 unit	527.671.859	APBD		35 unit	2.044.907.931
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	256 Unit	92.232.000	APBD		1280 Unit	648.167.597
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	Sekretariat DPRD	<b>100%</b>	<b>22.290.694.513</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>123.150.218.321</b>
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	30 orang/bulan	21.583.674.513	APBD		150 orang/60bulan	119.324.045.245
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	30 paket	326.070.000	APBD		150 paket	1.824.337.993
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Luar kabupaten	30 orang	380.950.000	APBD		150 orang	2.001.835.083
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD</b>	Sekretariat DPRD	<b>100%</b>	<b>1.044.192.754</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>7.217.092.289</b>
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	2 laporan	53.352.074	APBD		10 laporan	295.096.945
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	20 laporan	417.667.000	APBD		100 laporan	3.753.890.083

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	40 paket	573.173.680	APBD		200 paket	3.168.105.262
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu</b>	Sekretariat DPRD	<b>100%</b>	<b>15.850.389.504</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>107.736.887.853</b>
		<b>Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu</b>	Sekretariat DPRD	<b>6 Dok</b>				<b>6 Dok</b>	
		<b>Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti</b>	Sekretariat DPRD	<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan</b>	Sekretariat DPRD	<b>10 dok Perda</b>	<b>2.577.162.451</b>	APBD		<b>50 dok Perda</b>	<b>15.820.265.141</b>
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 dokumen	9.259.300	APBD		5 dokumen	51.164.418
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	10 dokumen	1.762.658.451	APBD		50 dokumen	11.319.612.849
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	3 dokumen	335.399.650	APBD		15 dokumen	1.853.295.672
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	3 dokumen	460.585.600	APBD		15 dokumen	2.545.027.179

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		yang Difasilitasi							
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 dokumen	9.259.450	APBD		5 dokumen	51.165.024
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran</b>	Sekretariat DPRD	<b>5 rekomendasi</b>	<b>573.757.000</b>	APBD		<b>25 rekomendasi</b>	<b>3.722.997.384</b>
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	1 dokumen	84.595.000	APBD		5 dokumen	467.446.302
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	1 dokumen	31.140.500	APBD		5 dokumen	172.074.788
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	1 dokumen	147.235.000	APBD		5 dokumen	813.599.472
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	1 dokumen	30.450.500	APBD		5 dokumen	168.263.761
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	1 dokumen	280.336.000	APBD		5 dokumen	2.101.613.065
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti</b>	Sekretariat DPRD	<b>20 laporan</b>	<b>5.646.235.000</b>	APBD		<b>310 rekomendasi</b>	<b>44.780.552.894</b>
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	8.910.880.502

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Hukum	Pemerintahan dan Hukum							
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	8.146.685.700
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	6.991.164.035
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	5.764.834.169
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	5.764.766.204
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	1 dokumen	30.861.000	APBD		5 dokumen	170.532.142
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	3 dokumen	867.220.000	APBD		15 dokumen	6.754.571.977
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	1 dokumen	412.054.000	APBD		5 dokumen	2.277.118.164

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal</b>	Sekretariat DPRD	<b>100%</b>	<b>3.195.339.600</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>19.537.163.940</b>
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	1 dokumen	-	APBD		5 dokumen	-
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	3 dokumen	1.305.822.000	APBD		15 dokumen	7.625.819.806
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	24 dokumen	298.995.000	APBD		120 dokumen	2.706.855.293
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	3 orang	264.172.000	APBD		15 orang	1.736.125.711
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	6 orang	274.732.000	APBD		30 orang	1.518.211.391
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	12 Dok	1.042.498.600	APBD		60 Dok	5.895.803.122
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dok	9.120.000	APBD		5 Dok	54.348.618
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan</b>	Sekretariat DPRD	<b>92 Dok</b>	<b>1.762.251.800</b>	APBD		<b>475 Dok</b>	<b>9.737.565.331</b>

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<b>pembangunan daerah</b>							
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Dalam kabupaten	1 laporan	69.370.000	APBD		5 laporan	383.316.134
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 Dok	84.987.000	APBD		5 Dok	469.608.812
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dalam kabupaten	3 dokumen	1.607.894.800	APBD		3 dokumen	8.884.640.384
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD</b>	Sekretariat DPRD	<b>2 Dok</b>	<b>139.932.453</b>	APBD		<b>10 Dok</b>	<b>773.483.388</b>
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dok	-	APBD		5 Dok	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	3 laporan	139.932.453	APBD		15 laporan	773.483.388
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Dok laporan fasilitasi tugas DPRD</b>	Sekretariat DPRD	<b>35 Dok</b>	<b>1.955.711.200</b>	APBD		<b>175 Dok</b>	<b>13.364.859.776</b>
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	10 dokumen	472.732.000	APBD		50 dokumen	3.058.315.333
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 laporan	25.000.000	APBD		5 laporan	138.140.781
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	12 Dok	753.455.000	APBD		60 Dok	5.575.187.321

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	12 Dok	704.524.200	APBD		60 Dok	4.593.216.341
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>51.205.981.924</b>			<b>51.205.981.924</b>	<b>297.600.781.905</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, maka ditetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2024**

Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>					
<b>Sekretariat DPRD</b>					
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat</b>		<b>74</b>	<b>35.355.592.420</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>BB</b>	<b>116.979.380</b>	<b>APBD</b>
Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	2 Dok	67.860.110	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	2 Dok	2.799.680	APBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dok	46.319.590	APBD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>6.371.007.641</b>	<b>APBD</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	45 orang/bulan	6.316.204.461	APBD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat DPRD	12 Dok	24.844.420	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat DPRD	2 Dok	29.958.760	APBD

Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>104.844.000</b>	<b>APBD</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekretariat DPRD	105 Paket	-	APBD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar kabupaten dan luar provinsi	20 orang	104.844.000	APBD
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>871.415.087</b>	<b>APBD</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 paket	31.000.640	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	10 paket	338.019.510	APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	7 paket	105.720.285	APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 paket	36.003.000	APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	4 dokumen	56.300.000	APBD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	1 laporan	32.485.000	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	45 laporan	236.804.000	APBD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat DPRD	8 dokumen	35.082.652	APBD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.733.560.411</b>	<b>APBD</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	0	1.500.000.000	APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretariat DPRD	34 unit	233.560.411	APBD
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.508.361.832</b>	<b>APBD</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 laporan	588.113.200	APBD

Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	2 laporan	920.248.632	APBD
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.314.536.802</b>	<b>APBD</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretariat DPRD	4 unit	358.399.204	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekretariat DPRD	3 unit	154.489.899	APBD
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sekretariat DPRD	50 unit	14.640.000	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekretariat DPRD	105 unit	167.103.840	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	7 unit	527.671.859	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	256 Unit	92.232.000	APBD
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>22.290.694.513</b>	<b>APBD</b>
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	30 orang/bulan	21.583.674.513	APBD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	30 paket	326.070.000	APBD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Luar kabupaten	30 orang	380.950.000	APBD
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.044.192.754</b>	<b>APBD</b>
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	2 laporan	53.352.074	APBD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	20 laporan	417.667.000	APBD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	40 paket	573.173.680	APBD

Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu</b>	Sekretariat DPRD	<b>100%</b>	<b>15.850.389.504</b>	APBD
	<b>Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu</b>	Sekretariat DPRD	<b>6 Dok</b>		
	<b>Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti</b>	Sekretariat DPRD	<b>100%</b>		
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan</b>	Sekretariat DPRD	<b>10 dok Perda</b>	<b>2.577.162.451</b>	APBD
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 dokumen	9.259.300	APBD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	10 dokumen	1.762.658.451	APBD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	3 dokumen	335.399.650	APBD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Sekretariat DPRD	3 dokumen	460.585.600	APBD
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 dokumen	9.259.450	APBD
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran</b>	Sekretariat DPRD	<b>5 rekomendasi</b>	<b>573.757.000</b>	APBD
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	1 dokumen	84.595.000	APBD
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	1 dokumen	31.140.500	APBD
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	1 dokumen	147.235.000	APBD
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	1 dokumen	30.450.500	APBD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	1 dokumen	280.336.000	APBD
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti</b>	Sekretariat DPRD	<b>20 rekomendasi</b>	<b>5.646.235.000</b>	APBD
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD

Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur	Pemerintahan Bidang Infrastruktur				
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	1 dokumen	30.861.000	APBD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	3 dokumen	867.220.000	APBD
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	1 dokumen	412.054.000	APBD
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal</b>	Sekretariat DPRD	<b>100%</b>	<b>3.195.339.600</b>	APBD
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	1 dokumen	-	APBD
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	3 dokumen	1.305.822.000	APBD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	24 dokumen	298.995.000	APBD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	3 orang	264.172.000	APBD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	6 orang	274.732.000	APBD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	12 Dok	1.042.498.600	APBD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dok	9.120.000	APBD
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan</b>	Sekretariat DPRD	<b>92 Dok</b>	<b>1.762.251.800</b>	APBD

Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>pembangunan daerah</b>				
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Dalam kabupaten	1 laporan	69.370.000	APBD
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 Dok	84.987.000	APBD
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dalam kabupaten	3 dokumen	1.607.894.800	APBD
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD</b>	Sekretariat DPRD	<b>2 Dok</b>	<b>139.932.453</b>	APBD
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dok	-	APBD
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	3 laporan	139.932.453	APBD
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Dok laporan fasilitasi tugas DPRD</b>	Sekretariat DPRD	<b>35 Dok</b>	<b>1.955.711.200</b>	APBD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	10 dokumen	472.732.000	APBD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 laporan	25.000.000	APBD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	12 Dok	753.455.000	APBD
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	12 Dok	704.524.200	APBD
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>51.205.981.924</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahun ketiga pada Renstra Periode 2021-2026 yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Paser maupun dengan Instansi terkait lainnya demi mewujudkan Kabupaten Paser Maju Adil Sejahtera.

